

KUALITAS PELAYANAN INSTITUSI, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN, SERTA KEPATUHAN PAJAK

Agus Bandiyono dan Rizaldi Al Hazmi

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: Kualitas Pelayanan Institusi, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan, serta Kepatuhan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan atau korelasi indeks institusi, indeks infrastruktur, serta indeks kepatuhan dan pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks institusi, indeks infrastruktur, dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki kekuatan korelasi masing-masing terhadap *tax ratio* tiap negara. Akan tetapi, adanya perbedaan bentuk geografis, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain menyebabkan perbedaan kebutuhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan reaksi atau *feedback* pelaku ekonomi atas peningkatan atau penurunan setiap indeks. Dengan kata lain, peningkatan pelayanan publik secara umum memiliki hubungan dengan *tax ratio*. Akan tetapi, seberapa besar dan pelayanan publik sektor apa serta unsur pelayanan publik mana yang paling memiliki hubungan dengan *tax ratio* berbeda-beda pada tiap-tiap negara.

Abstrak: Kualitas Pelayanan Institusi, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan, serta Kepatuhan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan atau korelasi indeks institusi, indeks infrastruktur, serta indeks kepatuhan dan pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks institusi, indeks infrastruktur, dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki kekuatan korelasi masing-masing terhadap *tax ratio* tiap negara. Akan tetapi, adanya perbedaan bentuk geografis, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain menyebabkan perbedaan kebutuhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan reaksi atau *feedback* pelaku ekonomi atas peningkatan atau penurunan setiap indeks. Dengan kata lain, peningkatan pelayanan publik secara umum memiliki hubungan dengan *tax ratio*. Akan tetapi, seberapa besar dan pelayanan publik sektor apa serta unsur pelayanan publik mana yang paling memiliki hubungan dengan *tax ratio* berbeda-beda pada tiap-tiap negara.

Kata Kunci: pelayanan publik, kepatuhan pajak, *tax ratio*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak netto mencapai Rp1.055.000.000.000,00 atau sebesar 81,5% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Persentase tersebut berada di bawah target minimal, yaitu sebesar 85%. Masalah yang ditemui oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap penerimaan pajak, keterbatasan kapasitas data Direktorat Jenderal Pajak dan rendahnya kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dengan beberapa cara seperti memperhitungkan *tax gap*, membandingkan jumlah wajib pajak yang aktif melapor dengan wajib pajak yang dorman, dan juga *tax ratio*.

Dalam situs investopedia.com dikatakan bahwa *tax ratio* yang juga disebut *tax revenue*

as percentage of GDP atau *tax to GDP ratio* ialah rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Dalam jurnal OECD yang berjudul “Revenue Statistics in Asian Countries: Trends in Indonesia, Malaysia, and Philippines” *tax ratio* Indonesia pada tahun 2008 s.d. 2013 sebesar 12,87%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata *tax ratio* Malaysia yang mencapai 16,15% dan rata-rata *tax ratio* Jepang sebesar 28,57%.

Penerimaan pajak perlu dinaikkan karena pajak memiliki fungsi yang cukup penting. Menurut Waluyo (2011) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran adalah fungsi pajak sebagai sumber pendapatan dalam anggaran. Fungsi mengatur adalah fungsi pajak sebagai salah satu alat untuk mengatur suatu hal agar mencapai tujuan tertentu. Mengingat bahwa

salah satu fungsi pajak yang telah disebutkan sebelumnya adalah fungsi anggaran (*budgetair*) maka rendahnya *tax ratio* tentu akan menimbulkan perlambatan pembangunan. Hal itu dapat terjadi karena sumber dana pemerintah lebih sedikit daripada yang seharusnya. Di samping itu, rendahnya *tax ratio* juga akan mengganggu pada kelangsungan negara itu sendiri.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015, sebesar 73,47% dari total pendapatan negara berasal dari sektor pajak, 15,28% dari sektor pendapatan negara bukan pajak, 11,07% dari sektor kepastian dan cukai, serta 0,19% dari sektor hibah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga terdapat pengalokasian dana untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang tertuang dalam berbagai macam bentuk belanja negara.

Pelayanan publik merupakan kegiatan penyediaan barang dan jasa publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contoh bentuk pelayanan publik antara lain pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peningkatan keamanan dan ketertiban, pengadministrasian data dan lain sebagainya. Menurut data dari World Economic Forum pada *Global Competitiveness Report* 2014 s.d. 2015 Indonesia menduduki peringkat 34 sedangkan Malaysia dan Jepang menduduki peringkat 20 dan 6 dari 144 negara.

Apabila sumber dana utama yang berasal dari pajak masih belum optimal, anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik juga berkurang. Padahal pemenuhan dan peningkatan pelayanan publik penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan *tax ratio* Indonesia dengan mengatasi permasalahan yang ada perlu dilakukan. Dalam Jackson dan Milliron (1986) ditemukan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak masyarakat. Selain itu, dalam kertas kerja Torgler, Schaffner, dan Macintyre (2007) disebutkan bahwa kualitas pemerintahan memengaruhi *tax morale*, yang berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini hanya akan digunakan 3 indeks dari 12 indeks

yang terdapat dalam *Global Competitiveness Report*. Ketiga indeks tersebut adalah indeks institusi, indeks infrastruktur, serta indeks kesehatan dan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan data dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Malaysia dipilih menjadi salah satu negara pembandingan karena penulis menganggap Malaysia memiliki kondisi alam yang hampir sama dengan Indonesia di samping kedekatan hubungan dengan Indonesia. Sementara itu, Jepang dipilih menjadi salah satu negara pembandingan karena penulis ingin membandingkan dengan negara yang memiliki *tax ratio* tinggi dan juga merupakan negara kepulauan selain kedekatan ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

Dalam kenyataannya, data *Global Competitiveness Index* tahun 2008 s.d. 2016 dapat ditemukan. Akan tetapi, terdapat keterbatasan data *tax ratio* Indonesia, Jepang, dan Malaysia yang tercantum dalam jurnal OECD yang berjudul *Revenue Statistics in Asian Countries: Trends in Indonesia, Malaysia, and Philippines*. Oleh karena itu, rentang tahun data yang digunakan dalam analisis hanya mencakup tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Global Competitiveness Report adalah laporan tahunan yang dipublikasi oleh World Economic Forum. *Global Competitiveness Report* pertama kali dipublikasikan pada tahun 2004 dan masih tetap ada hingga sekarang. *Global Competitiveness Report* berisi peringkat negara-negara berdasarkan *Global Competitiveness Index* yang dikembangkan oleh Xavier Sala-i-Martin dan Elsa V. Artadi.

Global Competitiveness Index terdiri atas 12 indeks. Indeks-indeks tersebut antara lain indeks *institution*, indeks *infrastructure*, indeks *macroeconomic stability*, indeks *health and primary education*, indeks *higher education and training*, indeks *good market efficiency*, indeks *labour market efficiency*, indeks *financial market sophistication*, indeks *technological readiness*, indeks *market size*, indeks *business sophistication*, dan indeks *innovation*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan atau korelasi indeks institusi, indeks

infrastruktur, serta indeks kepatuhan dan pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis seperti laporan, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi dengan menggunakan bantuan aplikasi untuk diolah dan menghasilkan koefisien korelasi. Dari koefisien korelasi tersebut dapat diketahui hubungan antara setiap indeks dan *tax ratio* negara masing-masing. Analisis korelasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Analisis korelasi merupakan studi pembahasan mengenai derajat hubungan atau derajat asosiasi antara dua variabel. Dalam melakukan analisis korelasi, dapat digunakan beberapa rumus yang berbeda. Rumus-rumus tersebut antara lain korelasi pearson, korelasi spearman, korelasi kendall, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumus korelasi yang digunakan dalam penghitungan adalah rumus korelasi kendall. Hal itu disebabkan karena data yang ada tidak memiliki distribusi normal yang merupakan asumsi rumus korelasi pearson. Selain itu, data juga tidak memenuhi asumsi korelasi spearman. Penghitungan korelasi dalam karya tulis ini tidak memasukkan nilai data ke dalam rumus korelasi kendall melainkan menggunakan rumus fungsi 'KCORREL' dalam aplikasi Microsoft Office Excel 2013 yang telah ditambahkan excel add-in realstats di dalamnya. Hasil dari korelasi kendall nantinya dapat bernilai positif maupun negatif dengan rentang nilai -1 s.d. +1. Tanda negatif dan positif pada nilai korelasi menunjukkan bentuk hubungan kedua variabel. Tanda negatif menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara keduanya sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan berbanding lurus antara kedua variabel.

Dalam pembahasan, koefisien korelasi kendall antara *tax ratio* dan poin subindeks yang diterima hanya yang bernilai positif kecuali untuk subindeks *malaria incidence*, subindeks *tuberculosis incidence*, dan subindeks *infant mortality*. Berkebalikan dengan itu, koefisien korelasi kendall antara *tax ratio* dan peringkat subindeks yang diterima hanya yang bernilai negatif tanpa pengecualian. Hal itu dilakukan untuk menjaga simpulan tetap memenuhi logika umum.

Korelasi Antara Peringkat Secara Umum dan *Tax Ratio*

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi Kendall didapatkan angka 0,74 untuk poin indeks institusi. Hal itu berarti bahwa secara umum terdapat hubungan yang sangat kuat antara *tax ratio* dan poin indeks institusi. Selanjutnya untuk poin indeks infrastruktur didapatkan angka 0,77 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat sedangkan untuk poin indeks kesehatan dan pendidikan hasil perhitungan menunjukkan angka 0,60. Nilai tersebut mengindikasikan secara umum terdapat hubungan yang kuat antara *tax ratio* dan poin indeks kesehatan dan pendidikan. Jadi, secara umum terdapat kemungkinan besar sangat besar peningkatan indeks institusi dan indeks infrastruktur akan diikuti dengan peningkatan *tax ratio*. Selain itu, terdapat kemungkinan yang kuat *tax ratio* meningkat jika indeks kesehatan dan pendidikan meningkat.

Indeks yang memiliki korelasi berbanding lurus atau memiliki nilai korelasi positif dengan *tax ratio* Indonesia adalah indeks infrastruktur dengan nilai korelasi sebesar 0,14 yang mengindikasikan hubungan yang lemah. Dari penjelasan tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa ada kemungkinan kecil peningkatan indeks infrastruktur akan disertai peningkatan *tax ratio* Indonesia.

Tax ratio Malaysia memiliki korelasi berbanding lurus dengan indeks institusi dan indeks infrastruktur dengan nilai korelasi masing-masing sebesar 0,41 dan 0,07. Hal tersebut berarti bahwa indeks institusi memiliki hubungan moderat dengan *tax ratio* Malaysia sedangkan indeks

infrastruktur memiliki hubungan yang kurang berarti dengan *tax ratio* Malaysia. Dari penjelasan sebelum dapat diketahui bahwa ada kemungkinan yang cukup *tax ratio* Malaysia meningkat jika indeks institusi Malaysia meningkat. Akan tetapi, hampir tidak ada kemungkinan *tax ratio* Malaysia naik jika indeks infrastruktur naik.

Poin semua indeks memiliki korelasi berbanding lurus dengan *tax ratio* Jepang. Indeks institusi memiliki hubungan yang sangat kuat, indeks infrastruktur memiliki hubungan moderat, dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang kurang berarti. Hal itu berarti bahwa dengan meningkatnya indeks institusi maka kemungkinan besar *tax ratio* Jepang juga meningkat. Sementara itu, jika indeks infrastruktur meningkat, terdapat kemungkinan yang cukup *tax ratio* Jepang ikut meningkat. Sedangkan kemungkinan *tax ratio* Jepang ikut meningkat jika indeks kesehatan dan pendidikan meningkat hampir tidak ada.

Korelasi Antara Indeks Institusi dan Tax Ratio

a. Indonesia

Tax ratio Indonesia hampir pasti meningkat jika pemerintah memperbaiki transparansi dalam pembuatan kebijakan. *Tax ratio* Indonesia memiliki kemungkinan sangat besar ikut meningkat jika perlindungan hak atas properti menjadi lebih baik. *Tax ratio* Indonesia memiliki kemungkinan besar ikut meningkat jika etika perusahaan di Indonesia membaik. *Tax ratio* Indonesia kemungkinan kecil meningkat jika perlindungan hak atas kekayaan intelektual, efisiensi birokrasi, keandalan pelayanan polisi, kekuatan standar audit dan standar pelaporan, kemampuan dewan pengurus, serta perlindungan atas kepentingan pemegang saham minoritas membaik.

b. Malaysia

Dari koefisien Kendall antara subindeks institusi dan *tax ratio* Malaysia antara lain *tax ratio* Malaysia memiliki kemungkinan sangat besar ikut meningkat jika beban akibat keputusan atau peraturan pemerintah menurun dan perlindungan atas kepentingan pemegang saham minoritas meningkat. *Tax ratio* Malaysia memiliki

kemungkinan sangat besar ikut meningkat jika ada perbaikan dalam perlindungan hak atas properti dan kekayaan intelektual, kepercayaan publik terhadap politisi meningkat, pengadilan menjadi lebih independen, kecenderungan pejabat pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan tertentu menurun, transparansi pemerintah dalam pembuatan kebijakan membaik, dan biaya bisnis akibat tindak terorisme menurun.

Tax ratio Malaysia memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkat jika biaya bisnis atas kriminalitas dan kekerasan menurun, kriminalitas yang terorganisasi menurun, dan etika perusahaan di Malaysia membaik. *Tax ratio* Malaysia kemungkinan kecil meningkat jika terjadi penghematan belanja pemerintah, pelayanan polisi menjadi lebih andal, standar audit dan pelaporan menguat, dan kemampuan dewan pengurus meningkat. Kemungkinan *tax ratio* Malaysia meningkat jika birokrasi pemerintah menjadi lebih efisien hampir tidak ada.

c. Jepang

Tax ratio Jepang kemungkinan sangat besar meningkat seiring dengan penurunan tingkat kriminalitas terorganisasi. *Tax ratio* Jepang memiliki kemungkinan besar meningkat jika terdapat penghematan pengeluaran pemerintah dan penurunan biaya atas tindak terorisme. *Tax ratio* Jepang memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkat jika terjadi penurunan biaya yang ditimbulkan oleh kriminalitas dan kekerasan. *Tax ratio* Jepang kemungkinan kecil meningkat jika kepercayaan publik terhadap politisi meningkat, etika perusahaan di Jepang membaik, dan terdapat perlindungan atas kepentingan pemegang saham minoritas yang lebih baik. Kemungkinan *tax ratio* meningkat jika anggaran lebih terdiversifikasi dan pengadilan menjadi lebih independen hampir tidak ada.

Korelasi Antara Indeks Infrastruktur dan Tax Ratio

a. Indonesia

Tax ratio Indonesia berpeluang sangat besar meningkat jika terdapat perbaikan infrastruktur rel, penambahan jumlah rute perjalanan pesawat, perbaikan penyediaan atau penyaluran listrik, dan

penambahan kabel telepon permanen. *Tax ratio* Indonesia memiliki kemungkinan besar ikut meningkat jika kualitas infrastruktur secara keseluruhan membaik.

Jika data 2 tahun pertama diabaikan, maka hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Subindeks yang memiliki korelasi lemah adalah subindeks subindeks *quality of roads* dan subindeks *fixed telephone lines* dengan koefisien korelasi kendall sama yaitu -0,18. Subindeks yang memiliki korelasi kuat adalah subindeks *quality of electricity supply* dengan koefisien korelasi kendall sebesar -0,55. Subindeks yang memiliki korelasi sangat kuat adalah subindeks *available airline seat km/week* dengan koefisien korelasi kendall -0,8. Subindeks yang memiliki korelasi mendekati sempurna adalah subindeks *quality of railroad infrastructure* dengan koefisien korelasi kendall sebesar -0,91.

Dari hasil penghitungan korelasi Kendall dengan mengabaikan data tahun 2008 dan 2009, *tax ratio* Indonesia hampir pasti meningkat jika terdapat perbaikan infrastruktur rel. *Tax ratio* Indonesia memiliki kemungkinan sangat besar ikut meningkat jika jumlah rute perjalanan pesawat ditambah. *Tax ratio* Indonesia kemungkinan kecil meningkat jika kualitas jalan membaik dan jumlah kabel telepon permanen bertambah.

b. Malaysia

Penambahan kabel telepon permanen dan perbaikan penyediaan atau penyaluran listrik kemungkinan besar akan diikuti peningkatan *tax ratio* Malaysia. *Tax ratio* Malaysia memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkat jika jumlah rute perjalanan pesawat bertambah. Perbaikan kualitas infrastruktur rel kemungkinan kecil disertai peningkatan *tax ratio* Malaysia. Informasi yang didapat dari koefisien Kendall antara subindeks infrastruktur dan *tax ratio* Malaysia antara lain *tax ratio* Malaysia kemungkinan besar meningkat jika terdapat perbaikan infrastruktur rel dan penyaluran atau penyediaan listrik yang lebih baik. *Tax ratio* Malaysia memiliki kemungkinan yang cukup ikut meningkat jika jumlah kabel telepon permanen ditambah. *Tax ratio* Malaysia memiliki kemungkinan kecil akan meningkat jika kualitas infrastruktur bandara diperbaiki.

c. Jepang

Kemungkinan sangat besar *tax ratio* Jepang akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur bandara. *Tax ratio* memiliki kemungkinan yang cukup akan ikut meningkat jika jumlah kabel telepon permanen bertambah. *Tax ratio* Jepang kemungkinan kecil akan naik mengikuti perbaikan kualitas jalan raya dan kualitas infrastruktur rel. Subindeks yang memiliki korelasi lemah adalah subindeks *quality of roads* dengan koefisien korelasi kendall -0,28. Subindeks yang memiliki korelasi kuat adalah subindeks *quality of railroad infrastructure* dengan koefisien korelasi Kendall -0,54. Subindeks yang memiliki korelasi sangat kuat adalah subindeks *quality of air transport infrastructure* dengan koefisien korelasi kendall -0,73. Dari pemaparan hasil tersebut, *tax ratio* Jepang kemungkinan sangat besar meningkat jika kualitas infrastruktur bandara diperbaiki. *Tax ratio* Jepang memiliki kemungkinan besar ikut meningkat jika kualitas infrastruktur rel membaik. *Tax ratio* Jepang kemungkinan kecil meningkat jika kualitas jalan raya meningkat.

Korelasi Antara Indeks Kesehatan dan Pendidikan dan *Tax Ratio*

a. Indonesia

Tax ratio Indonesia memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkat jika kualitas pendidikan dasar membaik dan jumlah persentase lulusan sekolah dasar bertambah. *Tax ratio* Indonesia kemungkinan kecil meningkat jika penyebaran HIV berkurang. Kemungkinan *tax ratio* meningkat jika usia harapan hidup bertambah hampir tidak ada.

b. Malaysia

Hanya terdapat 1 subindeks yang koefisien korelasi kendallnya negatif, yaitu subindeks *infant mortality*. Selain itu juga terdapat subindeks dengan koefisien korelasi kendall 0 yaitu subindeks HIV *prevalence* yang menandakan bahwa tidak ada kemungkinan *tax ratio* turun maupun meningkat jika terjadi peningkatan atau penurunan tingkat persebaran HIV. Subindeks *infant mortality* memiliki korelasi yang moderat yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi Kendall sebesar -0,45. Hal itu berarti bahwa penurunan

angka kematian balita atau bayi memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkatkan *tax ratio* Malaysia.

c. Jepang

Terdapat 3 subindeks yang dapat diterima, yaitu subindeks *tuberculosis incidence*, subindeks *business impact of HIV/AIDS*, dan subindeks *infant mortality*. Dari 3 subindeks, 1 tidak memiliki korelasi, 1 memiliki korelasi yang kurang berarti, dan 1 memiliki korelasi moderat. Subindeks *business impact of HIV/AIDS* tidak memiliki korelasi yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi kendall sebesar 0. Subindeks yang memiliki korelasi yang kurang berarti adalah subindeks *infant mortality* dengan koefisien korelasi kendall sebesar 0,07. Subindeks yang memiliki korelasi moderat adalah subindeks *tuberculosis incidence* dengan koefisien korelasi kendall -0,45. Dari hasil penghitungan korelasi Kendall dapat dikatakan bahwa *tax ratio* Jepang memiliki kemungkinan yang cukup akan meningkat jika jumlah insiden yang disebabkan oleh tuberkulosis menurun. Kemungkinan *tax ratio* Jepang meningkat jika jumlah kematian balita menurun hampir tidak ada.

SIMPULAN

Indeks institusi, indeks infrastruktur, dan indeks kesehatan dan pendidikan memiliki kekuatan korelasi masing-masing terhadap *tax ratio* tiap negara. Akan tetapi, adanya perbedaan bentuk geografis, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain menyebabkan perbedaan kebutuhan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan reaksi atau *feedback* pelaku ekonomi atas peningkatan atau penurunan setiap indeks. Dengan kata lain, peningkatan pelayanan publik secara umum memiliki hubungan dengan *tax ratio*. Akan tetapi, seberapa besar dan pelayanan publik sektor apa serta unsur pelayanan publik mana yang paling memiliki hubungan dengan *tax ratio* berbeda-beda pada tiap-tiap negara.

Penjelasan mendetail mengenai hasil penghitungan korelasi kendall antara *tax ratio* dan ketiga indeks beserta subindeksnya adalah sebagai berikut: Indeks infrastruktur berkorelasi dengan *tax ratio* di ketiga negara. Indeks yang

berkorelasi dengan *tax ratio* Indonesia adalah indeks infrastruktur dengan tingkat korelasi lemah. Indeks institusi menjadi indeks yang poinnya berkorelasi paling kuat dengan *tax ratio* di Malaysia dan Jepang walaupun memiliki kekuatan korelasi yang berbeda di kedua negara. Indeks institusi memiliki tingkat korelasi moderat dengan *tax ratio* Malaysia dan memiliki tingkat korelasi sangat kuat dengan *tax ratio* Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alebede, James O., Zaimah Bt. Zainol Arrifin, dan Kamil Md Idris. Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Nigeria: The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference. *Issues in Social and Environmental Accounting* 5, No. 1: 3—24
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan: Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Lewis, W. Carol dan Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem Solving Guide*. Edisi Ke-2. San Fransisco: Jossey Bass
- OECD. 2015. *Revenue Statistics in Asian Countries: Trends in Indonesia, Malaysia, and Philippines*. Paris: OECD Publishing. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-in-asian-countries-2015_9789264234277-en
- Roth, Gabriel Joseph. 1926. *The Private Provision in Public Services in Developing Countries*. New York: Oxford University Press
- Sutarto dkk. 2008. *IPS 3: Untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Torgler, Benno, Markus Schaffner, dan Alison Macintyre. 2007. *Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality*. Basel: Center of Research in Economics, Management, and Arts.